



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.1/H87

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD BAITUL HAQ DESA TUNGGALROSO KECAMATAN PREMBUN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca** : Surat Permohonan Tim Penggerak PKK Desa Tungalroso Kecamatan Prembun Nomor : 01/VI/2014 tanggal 4 Juli 2014 perihal : Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pos PAUD.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap persyaratan Pendirian Pos PAUD Baitul Haq yang diajukan Tim Penggerak PKK Desa Tungalroso Kecamatan Prembun perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pos PAUD Baitul Haq Desa Tungalroso Kecamatan Prembun.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95).

- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Jenis Layanan : **Satuan PAUD Sejenis (SPS)**
Nama : **Pos PAUD " BAITUL HAQ "**
Alamat : **Desa Tunggalroso Kecamatan Prembun**
Tgl/Bln/Thn Berdiri : **10 Mei 2011**
Penyelenggara : **Tim Penggerak PKK Desa Tunggalroso Kecamatan Prembun**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diatur, maka pemberian izin akan dicabut.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kebumen
Pada tanggal : 24 Agustus 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN**



AHMAD UJANG SUGIONO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth;

1. Camat Prembun;
2. Kepala UPTD Dikpora Unit Kec. Prembun;
3. Kepala Desa Tunggalroso;
4. Arsip.

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PREMBUN
DESA TUNGGALROSO**

SURAT KETERANGAN
Nomor : 147/12 SK/2010

**PENDIRIAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (POS PAUD)
DESA TUNGGALROSO, KECAMATAN PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN**

KEPALA DESA TUNGGALROSO

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Tungalroso diperlukan suatu Pos PAUD.
- b. Bahwa untuk dapat mencapai tujuan tersebut perlu didirikan Pos PAUD

Mengingat :

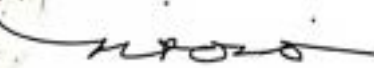
- a. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 28 tentang Sistem Pendidikan Anak Usia Dini.
- c. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Keuangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Memperhatikan :

- a. Petunjuk dari Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Tim Penggerak PKK tentang a. Pendirian Pos PAUD.
b. Koordinasi Tim Penggerak PKK Desa Tungalroso tanggal 10 Mei 2010

Memutuskan :

- a. Mendirikan Pos PAUD di Desa Tungalroso
- b. Menetapkan nama Pos PAUD "BAITUL HAQ"
- c. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan


Ditetapkan : Tungalroso
Pada tanggal : 10 Mei 2010
Kepala Desa Prembun

Margono

Tembusan :

1. Yth. Camat Prembun
2. Yth. Dinas DIKPORA Unit Kec. Prembun
3. TP PKK Kecamatan Prembun
4. Arsip